



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

PRESS RELEASE

Dili, 13 Februari 2007

**TAUR MATAN RUAK MERUPAKAN SAKSI TERAKHIR DALAM KASUS
MEMPERSENJATAI MASYARAKAT SIPIL DI TIMOR LESTE**

Sidang lanjutan XII terhadap kasus terdakwa Rogerio Tiago Lobato,cs itu diselenggarakan pada hari Selasa, 13 Februari 2007. Sidang dengar keterangan saksi kali ini, Pengadilan hanya menghadirkan saksi Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak. Para pengunjung yang mengikuti sidang sangat antusias untuk mendengarkan kesaksian dari Taur Matan Ruak karena ia adalah seorang petinggi militer yang dihadirkan oleh pengacara dari terdakwa Rogerio Lobato untuk memberikan keterangannya mengenai kasus pembagian senjata kepada pihak sipil.

Sebelum sidang tersebut dimulai, pihak pengacara dari terdakwa Rogerio Tiago Lobato,cs yang diketuai oleh Paulo dos Remedios mengatakan bahwa ada lima orang yang tidak dikenal mengendarai sebuah mobil Pajero berwarna putih dengan senjata lengkap mencoba melakukan tekanan kepada mereka. Tetapi pihak pengadilan yang diwakili oleh Hakim Ivo Nelson de Caires Rosa Batista mengatakan bahwa pihak pengadilan tidak mempunyai kompetensi untuk berbicara soal keamanan. Sebaiknya pengacara mengatakan hal ini pada pihak Kementerian Kehakiman dan pihak UNPOL untuk melihat hal tersebut agar kelak tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Dalam keterangannya kepada pengadilan Taur mengatakan bahwa ia tidak percaya jika orang seperti Rogerio Tiago Lobato akan melakukan kejahatan terhadap Negeranya sendiri. Sebab ia adalah salah seorang tokoh perjuangan dalam memperoleh kemerdekaan Timor Leste. "*Sekali lagi, saya tidak percaya akan hal ini*" kata saksi Taur Matan Ruak. Karena semua keluarganya mati dalam memperjuangkan kemerdekaan dan dia sendiri adalah seorang pendiri FALINTIL yang selama 24 tahun memperjuangkan kemerdekaan dari okupasi Indonesia. Lobato sendiri menempuh jalur pendidikan di Seminari yang *nota bene* akan menjadi Pastor kalau waktu itu ia tidak keluar dari Seminari. Oleh karena itu dia tidak mungkin akan berniat mengeliminasi para Pastor, Suster atau para Petisioner dan para pihak oposisi.

Saksi Taur menegaskan juga bahwa issue yang mengatakan di Timor Leste ada diskriminasi ras antara Loro Sa'e dan Loro Monu, menurut Taur hal tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah muncul karena semua orang yang ada di Negara Timor Leste adalah orang Timor.

Mengenai pembagian senjata kepada pihak sipil Taur memberikan kesaksian:

" bahwa sebenarnya ia tidak tahu menahu tentang hal itu. Setelah ada pemberitaan lewat media massa baru ia mengetahuinya. Senjata tersebut diberikan oleh siapa dan kepada siapa dirinya tidak tahu. Kemungkinan besar senjata tersebut diberikan oleh Rogerio seperti yang disangkakan kepadanya dengan tujuan untuk membantu Polisi yang pada saat itu sudah tidak ada lagi. Menurut Saksi Taur "dilihat dari politik praktis itu adalah tindakan yang benar." Seperti yang dilakukan oleh F-FDTL dalam merekrut para veteran perang untuk memberikan bantuan kepada F-FDTL jika ada ancaman. Karena kami tahu betul loyalitas para veteran perang tersebut. Mengenai hal itu, pihak kementerian Pertahanan dan Keamanan pun mengizinkan dan terealisasi pada tanggal 24 Mei 2006.

Ketika ditanya lagi mengenai siapa yang akan mengontrol para veteran perang yang telah dipersenjatai tersebut Taur menjawab bahwa pada prinsipnya merekalah yang tetap memegang kendali para veteran perang tersebut. Mengenai kasus Railos yang juga adalah veteran perang dan hilang kontrol, Taur menjawab lagi bahwa ia tidak mengetahui hal tersebut sebab Railos dan kawan-kawannya bukan orang bimbingannya.

JSMP berkesimpulan bahwa dari pernyataan saksi Brigadir Taur tentang pembentukan pasukan paralel untuk membantu F-FDTL dan Polisi dalam situasi tertentu merupakan suatu interpretasi hukum yang inkonstitusional. Sebab walaupun pasukan paralel tersebut adalah veteran perang, mereka tetap merupakan orang sipil yang tidak diperbolehkan secara hukum untuk memiliki senjata. Meskipun kita tahu persis akan loyalitas mereka dalam membela kepentingan Negara. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 146 dan pasal 147 Konstitusi RDTL bahwa yang berwewenang dalam Pertahanan dan Keamanan Nasional Timor Leste adalah F-FDTL dan Polisi. Konstitusi kita tidak memberikan peluang bagi rakyat sipil untuk bersenjata. JSMP berpendapat bahwa berdasarkan Konstitusi dan perundang-undangan lainnya, orang sipil tidak boleh besenjata. Memang dalam pasal 49 {1} Konstitusi RDTL mengatakan bahwa "Semua warga Negara memiliki hak dan kewajiban dalam mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas territorial Negara". Dengan memperhatikan bunyi dari pasal ini JSMP menginterpretasikan bahwa semua warga Negara memang mempunyai kewajiban penuh untuk membantu F-FDTL dan Polisi dalam mempertahankan teritori dan kemerdekaan Timor Leste. Tetapi bukan berarti masyarakat sipil diperbolehkan untuk memiliki senjata. Karena dalam ayat 2 dari pasal tersebut yang menyinggung tentang kerja militer mengatakan bahwa tugas militer diatur dengan Undang-Undang. Yang jelas Undang-Undang pun tidak memperbolehkan masyarakat sipil untuk memiliki

senjata atau menyimpan senjata kecuali para pihak yang bekerja sebagai anggota Militer yang memegang dan memiliki senjata.

JSMP merekomendasikan kepada pihak pemerintah untuk memperhatikan hal ini secara serius. Sebab, jika beropini bahwa memberikan senjata kepada orang sipil (Veteran) adalah benar secara praktis maka JSMP mengkhawatirkan bahwa kekacauan yang timbul di negara ini tidak akan pernah selesai. Menurut JSMP senjata yang dipegang oleh orang sipil tidak bisa dikontrol karena tidak ada kepemimpinan yang jelas. Meskipun demikian, JSMP memuji dan sangat menghormati sikap kolaboratif dari pihak petinggi F-FDTL Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak yang telah meluangkan waktu untuk hadir di Pengadilan agar bisa menyampaikan keterangan saksinya. Kita semua berharap bahwa melalui pemeriksaan pembuktian yang telah disampaikan, Pengadilan bisa mempertimbangkannya agar bisa menghasilkan suatu keputusan yang baik, benar dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pinada tersebut. JSMP tetap yakin bahwa Negara Timor Leste akan tetap tegak berdiri dan terus maju ke depan dengan kerja keras dari pihak Militer Timor Leste dan PNTL.

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI:

Maria de Vasconcelos

Acting Director, JSMP

Telephone: 332 3883

Email: vasconcelosmerry@yahoo.com